

PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL

Nurtanio Agus Puwanto

Abstract

Education is it doesn't matter always closely related with social life. That thing is in limited scale earned we to see as interaction of school with public around and education in society itself. In public laymen looks into someone based on it's the social status, like level of it's (the economics social, education even material properties owned).

In public is recognized also social institution as an order applied at one particular certain public. Institution of Social is life pattern standard reference a public so that always adhered by group of the public. If some acquitted outside institution embraced a public hence people or the group will be assumed impinges institution which has been specified. Talks about institution of social don't get out of development of culture happened in public.

Cultural development hardly influenced by public patterned thinking formed by education obtained, experience of public individual or group of people, foreign intervention and change of internal area and external happened.

Keywords: education, social life

Pendahuluan

Kehidupan sosial merupakan cermin nyata situasi yang terjadi di dalam masyarakat. Berbicara tentang masyarakat maka kita akan menemukan sebuah dinamika tanpa batas yang terjadi. Kemajuan pergerakan suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerjasama. Secara umum Mulyadi S.(2003: 36) mengelompokkan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, antara lain:

- a. Biologis, meliputi umur dan jenis kelamin.
- b. Sosial, antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan.

- c. Ekonomi, meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan sebagainya.
- d. Geografis, berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten dan sebagainya.

Dalam perjalanan kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini ternyata terdapat ancaman-ancaman yang berpotensi merusak tatanan nilai-nilai dalam masyarakat. Buchori(2001: 79-80) menyatakan beberapa hal yang mengancam ketahanan sosial masyarakat antara lain:

- a. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan termasuk kepastian hukum bagi seluruh rakyat.
- b. Arogansi kekuasaan, kekayaan atau materiil dan arogansi intelektual.
- c. Keberingasan sosial.
- d. Perilaku sosial menyimpang.
- e. Perubahan tata nilai, serta
- f. Perubahan gaya hidup sosial

Hal-hal diatas merupakan ancaman dari internal sedangkan ancaman dari luar antara lain adalah dampak globalisasi dan munculnya paham dan ide-ide asing yang berbahaya. Untuk menjaga eksistensi dan kredibilitas tatanan nilai dan sosial harus dilakukan dengan pembaharuan tata nilai pribadi, kelompok dan bangsa. Pembaharuan tata nilai pribadi (*personal value system*) mengindikasikan perlunya kita meninjau tata nilai pribadi sehingga kita dapat meresapi nilai-nilai luhur yang harus dijunjung serta menjaganya. Pembaharuan nilai kelompok (*group value system*) berkaitan dengan peninjauan nilai dalam kelompok kita, baik dalam arti golongan maupun kelompok

masyarakat. Pembaharuan nilai bangsa (*national value system*) merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus senantiasa dijunjung, dihormati dan di jaga kelestariannya.

Pendidikan dan Stratifikasi Sosial

Stratifikasi merupakan tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat, tingkatan atau kelompok sosial dapat dibedakan menurut beberapa hal, antara lain:

- a. Kekayaan
- b. Pekerjaan
- c. Pendidikan
- d. Pengaruh di masyarakat
- e. Status pribadi (darah biru, dan sebagainya)

Kekayaan dapat menjadikan seseorang berada dalam kelompok diatas dalam struktur masyarakat, apalagi saat ini orang sudah mulai silau kalau sudah berhadapan dengan kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan saat ini dapat melakukan apapun, bahkan keadilan dapat dibeli. Pekerjaan yang prestisius dari seseorang akan mengangkat derajat orang yang bersangkutan. Seorang anggota DPR misalnya, ia akan terpandang di daerahnya atau seorang lurah yang begitu dihormati di wilayahnya.

Pendidikan juga dapat mengangkat status sosial seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka ia akan dihormati di masyarakat karena dipandang serba tahu dan lebih pintar. Sedangkan pengaruh di masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kedudukan seorang di dalam masyarakat seperti orang yang lebih dituakan atau berjasa pada suatu masyarakat misalnya Mbah Marijan sebagai juru kunci gunung merapi. Status

pribadi yang melekat dalam diri seseorang seperti keturunan bangsawan atau anak menteri mampu juga mengangkat status seseorang.

Tukiman Taruna dalam Sindhunata (2000: 177-178) mengungkapkan empat struktur dalam karakteristik sosial masyarakat, yaitu:

- a. Struktur komunikasi, ada tiga gejala umum yakni seseorang atau anggota masyarakat menjadi pusat komunikasi, orang pinggiran atau bahkan terisolasi.
- b. Struktur sosiometrik, dalam masyarakat berkembang pola senang dan tidak senang
- c. Struktur kekuasaan, menunjuk pada relasi kekuasaan yang ada di dalam komunitas/masyarakat yang umumnya cenderung ditumpukan kepada seseorang tertentu saja.

Stratifikasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat memang tidak bisa dengan mudah dihindari tetapi harus dihadapi dengan penuh kearifan. Pemerintah telah mengatur bagaimana hubungan dalam bermasyarakat dan kehidupan melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang tujuannya adalah memanusiakan manusia karena manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,

menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejarah di berbagai penjuru dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

Landasan yang melatarbelakangi bangsa Indonesia mengacu pada hak asasi manusia adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia karena Deklarasi tersebut diacu oleh semua bangsa di dunia.

Dalam perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut.

- a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.
- b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi : hak

untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.

- c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.

Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari ketentuan dalam Ketetapan MPR-RI tahun 1998 tersebut maka stratifikasi sosial yang secara alamiah terbentuk dalam masyarakat harus dimaknai secara positif. Maksud dari makna positif tersebut adalah sikap dan toleransi termasuk kepedulian terhadap sesama manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stratifikasi yang ada di dalam masyarakat jika dimaknai negatif akan menimbulkan situasi yang kurang kondusif dalam masyarakat, antara lain dengan berkembangnya nuansa egoistik dan pluralistik yang merugikan individu, masyarakat dan lingkungan. Secara umum kecenderungan perubahan sosial ada sepuluh menurut Naisbit (Usman, 2001: 235).

Tabel Sepuluh Kecenderungan Perubahan Sosial

Dari	Menuju
Masyarakat industri	Masyarakat informasi
Teknologi biasa	Teknologi tinggi, sentuhan lembut
Ekonomi nasional	Ekonomi dunia
Jangka pendek	Jangka panjang
Sentralisasi	Desentralisasi
Bantuan lembaga	Bantuan diri sendiri
Demokrasi represif	Demokrasi partisipatif
Hirarkis	Jaringan kerja
Utara	Selatan
Salah satu	Option multiple

Perubahan-perubahan sosial tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus dihadapi. Jika kita tidak siap dalam hal ilmu pengetahuan, moral, tata nilai dan peri kehidupan maka kita akan terseret arus. Idealnya kita harus bisa bermain dalam perubahan tersebut tidak sekedar menjadi penonton utama pertempuran lintas kultural dan sektoral yang terjadi dalam dunia global. Cara kita meningkatkan kemampuan dan kesiapan kita menghadapi tantangan tersebut adalah dengan

memperoleh pendidikan yang baik dan memadai. Pendidikan yang dimaksud berlangsung dalam situasi formal, non formal dan in formal. Melalui pendidikan yang baik dengan mengajarkan secara berimbang antara ilmu pengetahuan dengan keimanan dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral maka perubahan yang terjadi bisa diantisipasi dengan baik bahkan menjadi leader bagi masyarakat untuk perubahan.

Pendidikan dan Mobilitas Penduduk

Secara umum mobilitas dapat dibedakan menjadi dua hal utama, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal terjadi sebagai dampak dari perubahan yang terjadi dalam diri individu atau kelompok masyarakat sebagai hasil dari karya, pengalaman, pendidikan, memperoleh kedudukan, hubungan dengan orang atau kelompok lain serta perubahan lingkungan internal dan eksternal. Contoh dari mobilitas vertikal antara lain adalah perubahan gaya hidup seseorang yang dulunya hanya sebagai petani kemudian menjadi anggota Dewan. Secara kapasitas individu sebenarnya kedudukan dia adalah sama tetapi dalam tinjauan sosial kemasyarakatan kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat umum lainnya. Keadaan tersebut merupakan contoh riil di masyarakat. Contoh lain adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu diangkat sebagai pemimpin di dalam kelompoknya, atau seseorang yang berpendidikan lebih tinggi menjadi tokoh di lingkungannya.

Berbicara tentang mobilitas horizontal kita akan dihadapkan pada suatu situasi dimana terjadi perpindahan penduduk terutama dari desa ke kota yang dipicu oleh harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di kota, kehidupan modern di kota

yang diidamkan dibandingkan dengan suasana tradisional di desa atau alasan keamanan lainnya.

Pada situasi yang berbeda ternyata bukan semata itu saja alasan mobilitas penduduk secara horisontal, banyak daerah yang memiliki kebiasaan untuk “merantau” ke daerah lain terutama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya misalnya dapat kita temukan disekitar kita menjamurnya masakan padang, soto kudus, sate madura, gudeg jogja dan sebagainya.

Contoh di atas paling tidak dapat menggambarkan mobilitas yang terjadi di sekitar kita. Secara umum penyebab utama mobilitas penduduk disebabkan antara lain karena faktor:

1. Ekonomi, tidak dapat kita elakkan keadaan ekonomi di Indonesia sangat beragam dan sangat tergantung pada daerah-daerah tertentu. Daerah yang memiliki sumberdaya alam dalam skala besar seperti Kalimantan Timur, Riau yang kaya minyak tentu pendapatan asli daerah (PAD) daerah tersebut juga tinggi sehingga dapat dipergunakan untuk membangun daerahnya. Daerah lain yang minus PAD-nya tentu kesulitan membangun wilayahnya. Kondisi seperti itu akan memicu mobilitas penduduk karena mereka tidak memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Lingkungan sosial-budaya, lingkungan suatu masyarakat sangat menentukan pribadi-pribadi didalamnya. Sebuah contoh dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang merantau ke berbagai daerah karena daerahnya tidak dapat atau kurang menjanjikan untuk dikembangkan. Di daerah Gunung Kidul banyak desa yang penduduknya sebagian besar wanita dan anak-anak karena penduduk pria

merantau bekerja di daerah lain dan baru pulang saat lebaran atau pada saat akan mulai menanam tanaman saat musim penghujan telah tiba. Karena sudah terpolakan sedemikian rupa maka hal itu dapat berjalan secara alamiah tanpa komando dan sudah berlangsung entah sejak kapan yang tidak dapat diketahui secara pasti.

3. Pendidikan, pemerataan pendidikan hingga saat ini masih merupakan sebuah isu yang belum tuntas diselesaikan. Di sekitar kita masih banyak anak-anak yang harus berjalan beberapa kilo untuk mencapai sekolah dan sarana-prasarana disekolah juga belum memadai ditambah lagi belum meratanya guru sehingga banyak sekolah yang “kekurangan” guru sehingga proses belajar mengajar kurang efektif.

Di berbagai daerah sering kita jumpai anak-anak usia sekolah yang bersekolah ke kota karena pendidikan di daerah asal kurang memadai atau bahkan tidak ada, tetapi setelah lulus mereka mencari pekerjaan di kota tersebut dan tidak mau pulang ke daerah asalnya. Kondisi demikian tentu akan semakin menambah tumpukan manusia di kota yang bisa kita ibaratkan semut sedang mengeroyok sepotong roti sehingga persaingan sangat keras. Kemajuan suatu daerah sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya, bagaimana daerah bisa membangun kalau sumber daya manusianya menumpuk dikota?. Otomatis daerah relatif statis atau sedikit perkembangannya.

Pendidikan dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat memiliki pola yang berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain bahkan antar komunitas tertentu

dangan yang lainnya. Tukiman Taruna dalam Sindhunata (2000: 179) berpendapat bahwa ada tujuh tipe ekologis sosial yang dapat berpengaruh terhadap komunitas, termasuk komunitas pendidikan, yaitu:

- a. Konsentrasi, contoh dari tipe ekologis sosial ini adalah terbukanya peluang yang mendorong terjadinya pemusatan pergerakan penduduk(konsentrasi). Secara otomatis adanya konsentrasi membutuhkan perimbangan pemenuhan kebutuhan yang lain, seperti perumahan , pendidikan, dan sebagainya.
- b. Sentralisasi, terjadinya pemusatan karena alasan kedekatan dengan fasilitas pokok seperti pasar, terminal, pertokoan dan sebagainya.
- c. Spesialisasi, komunitas terbentuk karena adanya kepentingan yang sama dari anggota komunitas, seperti profesi, minat, dan sebagainya.
- d. Segregasi, komunitas terbentuk karena berkumpulnya kelas khusus di suatu wilayah eksklusif seperti perumahan, jabatan, dan sebagainya.
- e. Desentralisasi, terbentuknya komunitas pinggiran.
- f. Invasi, gejala masuknya orang baru ke dalam suatu komunitas yang sudah ada.
- g. Suksesi, komunitas baru menggantikan komunitas lama baik dalam hal fungsi, lokasi maupun fasilitasnya.

Perubahan sosial yang terjadi antara lain juga disebabkan oleh globalisasi yang mengakibatkan hilangnya tradisi, budaya, bahkan terjadi dis-integrasi sosial. Kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia paska reformasi merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Tilaar (2002: 80-83) menyampaikan beberapa butir perubahan sosial menuju masyarakat Indonesia baru:

1. Lahirnya masyarakat terbuka, proses demokratisasi mendorong lahirnya masyarakat terbuka.
2. Manusia dan masyarakat Indonesia yang cerdas, membangun masyarakat terbuka dan demokratis memerlukan manusia yang cerdas.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan, rakyat mempunyai akses dan tanggung jawab langsung dalam membangun dan mengembangkan lembaga sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
4. Revitalisasi budaya lokal dalam rangka pengembangan kapital sosial.
5. Proses demokrasi dan globalisasi serta di topang oleh teknologi informasi untuk melahirkan nasionalisme asli sebagai identitas nasional.
6. Pengembangan ekonomi berdasarkan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah.
7. Pemerintah pusat dan daerah mengembangkan IPTEK secara berkesinambungan.
8. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan nasional.
9. Memacu tersedianya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang dapat bersaing dan bekerjasama dalam lingkungan global.
10. Sebagai anggota masyarakat global yang berbudaya.

Perubahan-perubahan masyarakat diatas cepat atau lambat akan terjadi seiring perkembangan masyarakat global.

Penutup

Dalam tinjauan kehidupan sosial, pendidikan merupakan upaya membentuk suatu masyarakat yang unggul dan mampu membawa lingkungannya kepada kemajuan yang dicita-citakan. Salah satu upaya membentuk individu-individu yang memiliki keunggulan dan kepekaan sosial dapat dilakukan melalui pendidikan. Perlu disadari bahwa pendidikan yang dimaksud bukan sekedar pendidikan di sekolah semata, melainkan pendidikan di keluarga dan masyarakat.

Komunitas dalam suatu masyarakat yang peduli terhadap kemajuan generasinya tentu memikul tanggung jawab ini secara serius. Pendidikan bukan sekedar tanggung jawab individu atau kelompok tertentu saja melainkan tanggung jawab bersama.

Daftar Pustaka

Cece Wijaya, Djaja Jajuri, A. Tabrani Rusyam. (1991). *Upaya Pembaharuan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya-Bandung 1991.

H.A.R. Tilaar. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII /MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Usman. (2004). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pascasarjana UNY.

Mochtar Buchori. (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.

Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel. (2001). *Educational Administration*. New York: McGrawHill.

White, R.V. (1987). *Managing Innovation*. ELT. Journal 41/3

Wright, T. (1987). *Roles of Teachers and Learners*. Oxford: Oxford University Press.